

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI BUMDes DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN DI KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Rifky Arief Rahman

NPP. 28.0476

*Asdaf Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung  
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: rifkyariefrahman.rar06@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement (GAP):** “IMPLEMENTATION OF BUMDes DIGITALIZATION IN IMPROVING WELFARE OF RURAL COMMUNITIES IN TULANG BAWANG BARAT DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE”.

**Purpose:** to find out how far the BUMDes Digitization Program is running in Tulang Bawang Barat Regency, Lampung Province, to find out the factors that influence the BUMDes Digitization Program to run, and to find out the efforts to deal with these factors. **Method:** qualitative descriptive with an inductive approach that describes the implementation of the BUMDes Digitization Program in Tulang Bawang Barat Regency, Lampung Province and uses data collection techniques used are observation, interviews, documentation. **Results:** Factors that hinder the digitization program are not supported by an adequate budget, human resources for managers are not optimal and limited collaboration from the private sector. The Department of Community and Village Empowerment of Tulang Bawang Barat Regency has sought various kinds of efforts and solutions by increasing the budget for the future, recruiting and providing training to managers and providing business innovations that the private sector can be interested in collaborating. **Conclusion:** The implementation of the BUMDes Digitization Program in Tulang Bawang Barat Regency is quite good. In the scope of appropriate technology it has been implemented well but in the scope of information technology it has not been implemented.

**Keywords:** Implementation, BUMDes Digitization Program

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** “IMPLEMENTASI DIGITALISASI BUMDes DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG”. **Tujuan:** untuk mengetahui sejauhmana berjalannya Program Digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya Program Digitalisasi BUMDes, dan untuk mengetahui upaya-upaya dalam menghadapi faktor tersebut. **Metode:** kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang mendeskripsikan

pelaksanaan Program Digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung serta menggunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Faktor-faktor yang menghambat program digitalisasi yaitu tidak didukung anggaran yang memadai, sumber daya manusia pengelola belum optimal dan terbatasnya kolaborasi dari pihak swasta. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengupayakan berbagai macam upaya dan jalan keluar dengan cara menambah anggaran untuk kedepannya, merekrut serta pemberian pelatihan kepada pengelola dan memberikan inovasi usaha yang dapat pihak swasta tertarik berkolaborasi. **Kesimpulan:** Implementasi Program Digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup baik. Pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana dengan baik akan tetapi pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Digitalisasi BUMDes

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

BUMDes harus mengikuti era digitalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Kementerian Pembangunan Pedesaan Desa dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah mempromosikan program digitalisasi melalui aplikasi. Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung BUMDes yang di berbagai Desa memiliki permasalahan yang ada, yaitu pengumpulan data, administrasi, distribusi masih manual dan kurangnya kerjasama dari pihak terkait sehingga kesejahteraan penduduk perdesaan belum maksimal. Digitalisasi dimaksudkan untuk BUMDes adalah

1. Pendataan
2. Administrasi
3. Distribusi dan
4. Kolaborasi

#### **1. Pendataan BUMDes**

Data BUMDes terdaftar pada aplikasi adalah BUMDes identitas yang meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian, AD / ART, Standard Operating Procedure (SOP), laporan keuangan terakhir, alamat email, media sosial digunakan, nama admin, dan unit bisnis.

#### **2. Administrasi BUMDes**

Administrasi BUMDes adalah proses kegiatan untuk merekam, mengklasifikasikan dan meringkas semua kegiatan BUMDes sistematis disajikan dalam bentuk laporan BUMDes Administrasi. Laporan itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk analisis dan hasil analisis membentuk dasar untuk membuat keputusan bisnis (BUMDes). Jenis-jenis buku BUMDes Administrasi (UMUM) sebagai berikut:

1. Buku Daftar Pengelola BUMDes
2. Buku Notulen Rapat BUMDes
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Buku Agenda Surat Keluar
5. Buku Rencana Kegiatan BUMDes

6. Buku Kas Harian BUMDes
7. Buku Pinjaman
8. Buku Insentif
9. Buku Laporan BUMDes
  - a. Laporan Kegiatan BUMDes
  - b. Laporan Keuangan BUMDes

### 3. Distribusi BUMDes

Distribusi dilakukan BUMDes pemasaran atau pemasaran. Dimana hasil kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes ini harus dilakukan sebanyak mungkin. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat distribusi hasil BUMDes kegiatan usaha masih dilakukan secara manual di mana era saat itu adalah abad ke-21 perlu ada inovasi baru dalam pemasaran atau juga dikenal sebagai Digital Marketing.

Digital Marketing memfasilitasi pengusaha untuk memantau dan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen, melalui dunia virtual pelanggan dapat menemukan dan mendapatkan informasi produk dengan lebih mudah. Digitalisasi Pemasaran melalui pemanfaatan teknologi ini untuk diterapkan pada pengembangan badan usaha skala mikro yang terletak di daerah pedesaan seperti usaha milik desa (BUMDes).

Pengembangan BUMDes membutuhkan 3 dasar utama, yaitu:

1. Pertama adalah Lembaga dan bisnis, BUMDes yang memiliki legalitas entitas hukum didorong untuk menetapkan potensi unit bisnis berbasis desa, melalui bisnis yang cocok dengan desa potensial untuk dapat menjadi penggerak ekonomi perdesaan.
2. Kedua adalah mengoptimalkan kebijakan dengan akses keuangan tersedia di BUMDes.
3. Ketiga adalah memfasilitasi akses ke pasar dengan platform digital dapat memudahkan hasil usaha BUMDes.

Terkait dengan dasar utama yang dibutuhkan dalam pengembangan BUMDes, digitalisasi pemasaran dan keuangan untuk BUMDes sangat mendesak untuk dilakukan mengingat BUMDes memiliki peran yang sangat strategis bagi roda perekonomian di desa itu sendiri.

### 4. Kolaborasi

Kerjasama ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas BUMDes. BUMDes bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro serta berbagai komunitas di desa adalah ide terhadap percepatan pembangunan desa. Interaksi yang intensif antara BUMDes dengan koperasi, lembaga kredit pedesaan / LPD, petani, nelayan, pengrajin dan usaha mikro lainnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Salah satu bentuk BUMDes ilustrasi bekerja sama dengan petani, misalnya dapat menampung kelompok produk pertanian dan membantu dalam distribusi produksi pertanian. Jika BUMDes kekurangan dana dapat mengandalkan koperasi dan LPD sebagai pendukung lembaga.

## 1.2. Permasalahan

Bagaimana Implementasi Digitalisasi BUMDes pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung?

Hal-hal apa saja kendala maupun penunjang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Implementasi Digitalisasi BUMDes pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung?

Upaya apa yang tepat di lakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengatasi kendala pada Implementasi Digitalisasi BUMDes pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung?

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dari digitalisasi BUMDes maupun implementasinya. Penelitian Zulifah Chikamawati berjudul Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, menemukan bahwa BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

Penelitian Amelia Sri Kusuma Dewi berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, menemukan bahwa Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Penelitian Cristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo berjudul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, menemukan bahwa bentuk usaha dan pengembangannya di badan usaha milik desa ini sangat banyak akan tetapi lama-kelamaan yang sudah ada pada akhirnya berhenti.

Penelitian Romanus Danamil dan Wasit Ginting berjudul Implementasi TIK Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dengan Model Multimedia Development Life CYCLE (MDLC) Untuk Informasi Digital Pariwisata Sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Pengunjung Desa Wisata Dokan, menemukan bahwa

dalam implementasi TIK pada BUMDES untuk informasi digital pariwisata pada saat ini dapat terbantu untuk mengenalkan objek wisata desa yang ada serta dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus terlebih dahulu mengunjungi desa-desa. Penelitian Enok Rusmanah berjudul Implementasi Digital Marketing Guna Peningkatan Peluang Pasar Produksi Hasil Ternak Puyuh Masyarakat Galuga, menemukan bahwa permasalahan yang dialami ialah belum optimal kemampuan strategi pasar serta upaya mengatasinya ialah kendala teknis terkait perkembangan teknologi dan membangun keberanian untuk mencoba peluang baru.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan implementasi digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik seperti kegunaan media komputer sampai alat bantu usaha BUMDes walaupun pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk sejauhmana implementasi digitalisasi pada BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

## **II. METODE**

Peneliti memakai model penelitian kualitatif (Sugiyono,2013) menggunakan grand theory implementasi George Edward III serta pola deskriptif memperkenalkan bentuk pendekatan induktif yang bertujuan untuk menentukan bagaimana pelaksanaan digitalisasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kabid pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa, ketua BUMDes serta warga setempat. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh (Sugiyono, 2014) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis Fokus Riset Prespektif Legalistik**

4 Indikator berhubungan dengan penelitian ialah pendataan, administrasi, distribusi dan kolaborasi.

#### **1. Pendataan**

Pada pendataan BUMDes telah terlaksana dengan baik yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik dari segi identitas meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian. AD / ART, SOP, serta laporan keuangan.

2. **Administrasi BUMDes**  
Administrasi BUMDes telah cukup baik kelengkapan baik berupa buku daftar pengelola BUMDes, buku notulen rapat hingga buku harian dan lainnya.
3. **Distribusi BUMDes**  
Sektor distribusi BUMDes masih berupa konvensional yaitu dimana hasil-hasil usaha BUMDes disalurkan atau dijual ke pasar-pasar terdekat.
4. **Kolaborasi**  
Kolaborasi saat ini yang ada pada BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung ialah bank bri. Kerjasama yang ditawarkan BRI berupa bagi hasil dari keagenan BRILink, simpan pinjam serta pinjaman modal. BUMDes desa wono kerto dan candra jaya kecamatan tulang bawang tengah yang masih saat ini bekerja sama.

### 3.2. Analisis Fokus Riset Prespektif Teoristik

4 Indikator teori George Edward III ialah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) serta struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Kebijakan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan agar bisa diketahui siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut dan apa yang harus dilakukan agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik sesuai target dan harapan. Oleh karena itu hubungan-hubungan komunikasi perlu dibangun agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan efektif. Komunikasi ini terkait dengan proses penyusunan perencanaan program digitalisasi BUMDes. Dalam hasil wawancara bersama Kabid ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: belum terlaksananya BUMDes berbasis internet baik dari pendataan serta pemasaran hasil BUMDes hanya telah ada teknologi tepat guna yang dipakai aparatur BUMDes setempat dalam pengelolaan BUMDes seperti hasil pengelolaan usaha adanya mesin pembajak untuk pertanian, mesin pertamini, mesin mini atm dan lainnya.

#### 2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (Staf).

Dari hasil wawancara aparatur BUMDes tersebut diketahui bahwasanya masih rendahnya kualitas kompetensi masing-masing aparatur pengelolanya berikut contoh susunan bumdes desa penumangan baru. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.**

#### **STRUKTUR ORGANISASI BUMDes DESA PENUMANGAN BARU**

No	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	Hi.KAMSO	Penasehat
2.	SUPADI	Pengawas
3.	MIDATI	Ketua
4.	MISWATI	Sekretaris

5.	ROAITUN	Bendahara
----	---------	-----------

Sumber : Data dari ketua BUMDes Penunangan Baru

Dari hasil wawancara rata-rata jumlah aparatur pelaksana kegiatan BUMDes hanya berlatar belakang pendidikan SLTA. Hal ini berakibat pada rendahnya kompetensi mengenai pengetahuan tentang pemerintahan. Hal ini akan berpengaruh pada tidak maksimalnya kinerja pegawai sehingga mengakibatkan kinerja mereka belum mampu dalam upaya meningkatkan usaha BUMDes tersebut.

### 3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Disposisi/sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Tingkah laku atau sikap aparatur pelaksana menjadi salah satu penunjang efektifnya implementasi. Dalam disposisi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pengangkatan birokrat dan insentif.

#### a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrasi harus didasarkan kepada nilai-nilai kompetensi, integritas dan loyalitas. Dalam pengangkatan pengurus BUMDes diputuskan oleh kepala desa dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut dapat dilihat di lampiran belakang laporan akhir.

#### b. Insentif

Salah satu pendorong kinerja adalah dengan pemberian insentif agar para pelaksana memiliki motivasi dan semangat kerja yang besar. Dari hasil wawancara dengan kabid ekonomi serta aparatur bumdes menjelaskan bahwa : Dana insentif yang diberikan kepada pengurus bumdes ketentuan tentang tunjangan kesejahteraan pengelola operasional hanya diatur di dalam AD/ART tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengharuskan besaran atau persentase tertentu.

Dengan adanya insentif tersebut diharapkan para pelaksana dan pengelola BUMDes dapat memaksimalkan kerjanya sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin dikehendaki yakni dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

### 4. Struktur Birokrasi

Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Struktur organisasi-organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu:

- a. Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi.
- b. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi memerlukan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi. Berdasarkan teori tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan bumdes, maka pengelola aparatur bumdes mempunyai tugas dan peran yang dijalankan. Secara umum pengelola bumdes terdiri dari :

- Penasehat
- Pengawas
- Ketua
- Bendahara
- Sekretaris

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan BUMDes dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Untuk susunan pelaksana operasional terdiri dari ketua (direktur), sekretaris, bendahara dan para manajer unit/kepala unit atau nama lain sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing. Pelaksana Operasional BUMDes adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes.

Selanjutnya, pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan usaha desa yakni tidak hanya mengurus BUMDes saja tapi mengelola keseluruhan usaha BUMDes beserta unit-unit usaha BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART BUMDes. Untuk menjamin agar BUMDes dapat berkembang dengan baik, hendaknya pelaksana operasional tidak rangkap jabatan di lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lain.

### **3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Komitmen Pemerintah**

Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kabid ekonomi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Selain suntikan dana dari pemerintah pada tahun 2019 juga memberikan fasilitas pendukung untuk pengelolaan BUMDes

##### **b. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam**

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

#### **2. Faktor Penghambat**

##### **a. Tidak Didukung Anggaran Yang Memadai**

Dari hasil wawancara dengan Kabid ekonomi bahwa BUMDes sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal

itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES itu sendiri. Pada modal utama BUMDes saat ini ialah dana prioritas ADD desa yang dana tersebut tidak selalu berfokus pada kegiatan BUMDes akan tetapi keperluan infrastruktur desa.

#### b. Sumber Daya Manusia Pengelola Belum Optimal

Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam Kabid ekonomi menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Dikarenakan pernah terjadi ada beberapa desa yang usaha kebanyakan ialah unit simpan pinjam karena itu perlu adanya inovasi usaha baik dari pengelola maupun masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi desa.

#### c. Terbatasnya Dukungan Dari Pihak Swasta

Keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan wawancara mendalam Kabid ekonomi menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Dikarenakan pernah terjadi ada beberapa desa yang usaha kebanyakan ialah unit simpan pinjam karena itu perlu adanya inovasi usaha baik dari pengelola maupun masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi desa.

### **3.4. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Digitalisasi BUMDes**

- a. Memberikan Sosialisasi tentang unit usaha apa yang dapat dikembangkan oleh desa, dengan sosialisasi bersama kepada pengelola BUMDes serta masyarakat setempat usaha-usaha yang dapat meningkatkan ekonomi perdesaan untuk dapat tertarik pihak swasta berkolaborasi.
- b. Merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengembangan usaha ekonomi desa.
- c. Menambah anggaran untuk kedepannya. Untuk meningkatkan agar pelaksanaan Digitalisasi BUMDes, pemerintah menambahkan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program Digitalisasi BUMDes.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program digitalisasi BUMDes di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung penulis menemukan bahwa dalam dua ruang lingkup yaitu pada ruang lingkup teknologi tepat guna sudah terlaksana cukup baik dapat membantu dalam pelaksanaan unit-unit usaha BUMDes-BUMDes. Contohnya ialah penggunaan media komputer dalam pelaksanaan administrasi-administrasi yang dilakukan aparatur BUMDes serta teknologi bantu dalam hasil usahanya berupa traktor pada bidang pertanian dan lainnya. Kedua pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana sehingga masih bersifat konvensional pada distribusi hasil usaha BUMDes tersebut. Sama halnya dengan temuan Romanus

Danamik dan Wasit Ginting bahwa dalam implementasi TIK pada BUMDes untuk informasi digital sangat penting dan membantu pada penelitiannya ia menemukan bahwa informasi digital pariwisata pada saat ini dapat terbantu untuk mengenalkan objek wisata desa yang ada serta dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus terlebih dahulu mengunjungi desa tersebut. Layaknya temuan lainnya pada peneliti Enok Rusmanah menemukan bahwa belum optimalnya strategi pemasaran dapat menghambat keberlanjutan keuntungan yang didapatkan serta upaya mengatasinya ialah pada kendala teknis terkait perkembangan teknologi dan membangun keberanian untuk mencoba peluang baru

#### **IV. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program digitalisasi BUMDes pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik dapat membantu administrasi-administrasi BUMDes serta unit hasil usaha yang dihasilkan. Pada program digitalisasi BUMDes ada faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung ada dua yaitu adanya komitmen pemerintah dan tersedianya potensi sumber daya alam. Faktor penghambat 3 indikator yaitu tidak didukung anggaran yang memadai, sumber daya pengelola belum optimal dan terbatasnya kolaborasi dari pihak swasta. Upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ialah memberikan sosialisasi tentang unit usaha yang tepat, merekrut dan memberika pelatihan dan menambah anggaran untuk BUMDes-BUMDes tersebut. Guna meningkatkan digitalisasi BUMDes disarankan kepada pemerintah desa berupaya memberikan anggaran lebih dalam kegiatan digitalisasi BUMDes serta kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan pembinaan dan sosialisasi inovasi kegiatan unit usaha.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul, K. & Terra, CH. Triwahyuni. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. ANDI Yogyakarta
- Creswell, J.W. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publication.  
<https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya Sagala
- Nazir, 2013. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Neuman, W.L (2006). Chapter 6: *Qualitative and Quantitative Research Design*. In *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*.

Nugroho,R.(2008).Public Policy:Teori Kebijakan,Analisis Kebijakan,Proses Kebijakan,Perumusan,Implementasi,Evaluasi,Revisi,Risk Management dalam Kebijakan Publik,Kebijakan sebagai Fifth Estate,Metode Penelitian Kebijakan.In Jakarta:Alex Media Komputindo

Purwanto, Sulistyastuti.2012.Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia). Yogyakarta. Gava Media

Sugiyono,2012.Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:ALFABETA.

\_\_\_\_\_,2014.Metode Penelitian Manajmen.Bandung:ALFABETA

\_\_\_\_\_,2015.Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:ALFABETA

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Warwick, Donald P. 2008. Integrating and Implementation: a transactional Approach.

Wheelen, Thomas L dan Hungger, J. Davis, (1995), Strategic Management and Bussiness Policy, Singapore, Addison Wessley.

Wijaya,B.R.,& Supardo. (2006).Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya.Yogyakarta:CV.Andi Offset

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus).

Yogyakarta. CAPS

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan UMUM,Pendirian BUMTiyuh/BUMDes,Pengurusan Dan pengelolaan Organisasi,Pembinaan Dan Pengawasan serta Ketentuan Peralihan

Badan Pusat Statistik Indonesia

<https://www.lampung.antaranews.com>. Kabupaten Tubaba jadi “Pilot Project” Kerjasama BRI-BUMDes. Minggu, 26 November 2017